

GAYA KEPEMIMPINAN GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GCG)

Sulistyo Seti Utami

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu Jakarta Selatan

E-mail: sulistyo_setiutami@yahoo.com

Abstract

When Joko Widodo was elected as a governor of DKI Jakarta, it has proven that today's people are more realistic and smarter to choose their leader for period 2012-2017, even though at that time a lot of issue of syara, personality, being raised, but people keep choose Joko Widodo and Ahok who are able bring changes to DKI Jakarta. After one year Joko Widodo sit as a governor, people has been able to feel that his work programs are pro-people, almost every day he goes to see slums, relocate many markets or places into the correct functions, such as Tanah Abang market. His Success as a solo governor and DKI Governor Jakarta (even still only one year), based on the results of the survey showed that Joko Widodo is in the first place as a candidate for President of the Republic of Indonesia in 2014. Joko Widodo understand well what exactly needed by the community Indonesia at this moment, he is the leader figure expected by Indonesian people. His leadership style is low profile, not much to say but a lot of work, and discipline. Joko Widodo's leadership is based on the concept of good corporate governance, which consists of: Participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, effectiveness, accountability, having strategic vision.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Prinsip GCG, Asta Brata, Mahabarata

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1998 runtuhnya rezim Suharto sampai sekarang Indonesia berada dalam krisis kepemimpinan, mulai dari level paling atas yaitu presiden sampai ke gubernur, bupati, camat, lurah bahkan sampai kepada kepala desa. Rakyat sudah bosan menerima janji-janji politik para kandidat kepala pemerintahan pada waktu kampanye, namun realitasnya, janji hanya tinggal janji dan pada umumnya mereka sudah lupa dengan retorika politik pada waktu mengambil hati konstituennya.

Setelah menjabat sebagai kepala pemerintah, mereka lupa diri dan melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan, hal ini dapat kita buktikan banyak gubernur, bupati, camat, lurah maupun kepala desa yang masuk penjara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan (Suara Pembaharuan, 5 Juli 2013) sampai saat ini, sudah 297 kepala daerah terdiri gubernur, bupati dan wali kota masuk penjara karena melakukan pelanggaran hukum, di antaranya terkait kasus korupsi. Selain itu, sekitar 2.000 anggota DPRD dan PNS di seluruh Tanah Air juga masuk penjara.

Gaya kepemimpinan kepala daerah sekarang banyak yang mengutamakan pencitraan diri, kamufase dan fatamorgana. Sebelum terpilih para kandidat berbicara demi rakyat, demi keadilan, anti korupsi, mendatangi para petani, nelayan, buruh dan masyarakat miskin. Namun setelah terpilih mereka lupa dengan janji, susah untuk ditemui. Kondisi seperti ini terjadi berulang kali dengan modus yang sama.

Raden Ngabehi Ranggawarsita III (1802-1873) dalam sebuah syairnya berjudul *Serat Kalatidha*, dalam Prajayanti (2012) sebagai berikut (*Amenangi jaman edan, Ewuh eya ing pambudi, Melu edan nora tahan, Yen tan melu anglakoni. Boya kaduman melik, Kaliren wekasanipun, Dilalah karsa Allah, Begja-begjane kang lali, Luwih begja kang eling lan waspada*). Sekarang ini zaman sudah edan/gila, di birokrasi orang jujur akan tersingkir, koruptor berkedok tokoh masyarakat, berkedok dermawan, koruptor disidang di pengadilan pada umumnya tampil dengan gagah perkasa, tanpa ada rasa malu dan penyesalan bahkan yang lebih edan lagi keluar dari penjara disambut oleh masyarakat pendukungnya dengan gegap gempita bak seorang pahlawan yang baru pulang dari medan laga.

Pada saat ini masyarakat sudah jenuh, bosan dan bahkan sudah muak melihat tingkah laku oknum pejabat, kasus korupsi setiap saat bergulir terus silih berganti, namun demikian, masih ada beberapa kepala daerah yang dikenang dan mendapat apresiasi dari masyarakat.

Salah satu kepala daerah yang memiliki prestasi yang luar adalah Joko Widodo (Jokowi). Ia menjabat Walikota Solo dua periode 2005-2015, pada pemilihan periode kedua Jokowi menang telak 90% suara dan sekarang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Saat ini, belum menjabat satu tahun sebagai Gubernur DKI, Jokowi terpilih sebagai bakal calon presiden terkuat pemilu 2014 nanti berdasarkan beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga survei.

Pada saat ini Gubernur DKI Jokowi merupakan gubernur yang fenomenal karena melakukan langkah-langkah yang berbeda dengan kepala daerah lainnya. Pada umumnya pejabat di Negara Republik Indonesia ini dengan gaya feodal, minta dilayani, susah ditemui dan jarang terjun ke masyarakat atau lebih suka dibelakang meja dan menerima laporan dari bawahan. Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi kontras dengan gaya kepemimpinan tersebut di atas, seperti gaya blusukan, berjalan di gang kumuh, sederhana, tidak banyak retorika, melayani masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam banyak literatur, kepemimpinan (*leadership*) jika ditinjau dari etimologi berasal dari kata pimpin atau "lead". Kepemimpinan merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Menurut Tead, Terry, dan Hoyt (dalam Kartono, 2003), kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

Menurut Young dalam (Kartono, 2003), kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Seorang pimpinan dalam menjalankan tugas manajer mempunyai gaya yang bermacam, hal ini dapat terjadi karena adanya pengaruh internal dan eksternal. Setiap gaya kepemimpinan belum tentu cocok untuk semua organisasi dan perlu disesuaikan dengan lingkungan perusahaan, serta untuk menerapkan gaya kepemimpinan perlu dipahami lingkungan perusahaan itu sendiri. Kartono (2009) menyebutkan, macam gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin di seluruh dunia antara lain:

1. Gaya Kepemimpinan Paternalistik.

Tipe pemimpin paternalistik yang bersifat kepatuhan, dengan sifat-sifat diantaranya:

- a. *Overly protective.*
- b. Selalu bersikap maha tahu dan maha besar.
- c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris.

2. Gaya Kepemimpinan Karismatik

Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara bicarannya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Mungkin, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini bisa dianalogikan dengan peribahasa "Tong Kosong Nyaring Bunyinya". Mereka mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang-orang yang datang ini akan kecewa karena ketidakkonsistennya. Apa yang diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggungjawabannya, si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji.

Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Banyak memberikan inspirasi, keberanian dan keyakinan teguh pada pendirian sendiri.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas

Pemimpin ini berpandangan bahwa

umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi.

4. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Pemimpin yang demokratis biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung secara mantap dengan gejala-gejala sebagai berikut: (1) organisasi dengan segenap bagianya berjalan lancar; dan (2) otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah, dan masing-masing menyadari tugas serta kewajibannya masing-masing.

5. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini.

Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara. Makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya. Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang harus dipatuhi. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukan

sikap yang menonjolkan “keakuannya”, antara lain dalam bentuk kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin akan bersikap baik pada bawahannya asalkan bawahan itu patuh atas semua perintah yang telah diberikan.

6. Gaya Kepemimpinan Militeristik

Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah:

- a. Lebih banyak menggunakan sistem perintah, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana.
- b. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.
- c. Sangat menyenangkan formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan.
- d. Menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya.
- e. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya.
- f. Komunikasi hanya berlangsung searah.

7. Gaya Kepemimpinan Populistik

Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme.

8. Gaya Kepemimpinan Administratif/ Eksekutif

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknokrat-teknokrat dan administrator-administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan.

Selanjutnya, pemimpin sebagai seorang pengambil kebijakan/keputusan, Terry (2002) menyebutkan lima dasar, yaitu:

1. Intuisi

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subyektif sehingga mudah terkena pengaruh. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek dan memberi kepuasan sesaat dan tidak betahan untuk jangka panjang karena keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena tidak ada pembandingnya sehingga sulit untuk diukur kebenaran dan keabsahannya serta seringkali mengabaikan dasar-dasar dan tahap-tahap pengambilan keputusan.

2. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

3. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam

jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas (otentik), tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan.

4. Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

5. Rasional

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal yakni: (a) kejelasan masalah: tidak ada keraguan dan kekaburan masalah; (b) orientasi tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai; (c) pengetahuan alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya; (d) preferensi yang jelas; alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria dan (d) hasil maksimal: pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal.

Selanjutnya, terkait dengan GCG, menurut Komite Cadbury dalam Emirzon (2006), GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Di sisi yang lain, kelompok negara maju (OECD), umpamanya mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan: (1) suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya; (2) suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan; dan (3) suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Menurut UNDP dalam Batubara (2006) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan efektif.
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dengan berbagai pernyataan negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap *clean and good governance*, di antaranya (Efendi, 2005):

1. Integritas pelaku pemerintahan. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.
2. Kondisi politik dalam negeri. Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya *good governance* konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan, maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan

mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

4. Kondisi sosial masyarakat. Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil *good governance*. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan.
5. Sistem hukum. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di setiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan *good governance*. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. *Good governance* tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

TUJUAN PENULISAN

Sekarang, bagaimana jika gaya kepemimpinan Jokowi dikaitkan dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*)? Tulisan akan mengupas dan menganalisis gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jokowi dari aspek prinsip GCG.

METODE

Pembahasan dalam artikel ini dilakukan melalui metode deskriptif-analitis-kritis yaitu sebuah metode untuk menggambarkan karakter kepemimpinan Gubernur DKI Jokowi.

Yang dimaksud dengan analitis-kritis adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai dengan argumentasi teoritik. Dalam kerangka itu, pendekatan penulisan artikel ini menggunakan pendekatan keterpaduan (*integrality*). Pendekatan keterpaduan menekankan pada pentingnya keterkaitan (*linkages*) teoritik dengan fakta dan fenomena sebagai basis analisis. Pendekatan keterpaduan ini juga merupakan sudut pandang (perspektif) penulis atas persoalan inti yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Kepemimpinan Jokowi

Perbedaan kepemimpinan (*leadership*) dengan manajemen (*management*) terletak pada konsep. *Managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing*. Kepemimpinan memakai konsep efektif sedangkan manajemen memakai konsep efisien memimpin membutuhkan seni dan gaya tersendiri, banyak faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang diantaranya bakat, keturunan, lingkungan pengalaman personal, pendidikan dan lain sebagainya. Suatu aktivitas yang dilakukan dengan efektif belum tentu efisien dan begitu juga sebaliknya. Di sinilah letaknya kepiawaian seorang pimpinan untuk melaksanakan konsep efektif dan efisien secara bersamaan, sehingga dapat meminimal resiko dan penolakan atau dengan kata lain bahwa kualitas seorang pimpinan ditentukan berdasarkan kualitas keputusan yang dibuat dalam menghadapi masalah.

Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Joko Widodo waktu menjabat sebagai wali kota Solo dan menjabat sebagai gubernur DKI pada saat ini adalah sesuatu yang sangat sederhana yaitu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada era orde baru rakyat berada dalam suasana mencekam, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan menyampaikan aspirasi, meskipun kita tahu seorang pejabat atau aparatur negara bersalah tidak ada

yang berani untuk melaporkan, demonstrasi dan sebagainya.

Pada era reformasi sekarang ini, setiap orang bebas menyampaikan pendapat, melawan aparat bahkan mencaci-maki kepala pemerintahan mulai dari lurah, camat, bupati/walikota bahkan presiden. Para calon kepala pemerintahan waktu kampanye pemilihan kepala pemerintahan hampir dipastikan memberikan retorika politik, janji-janji manis tanpa ada realisasi dan kondisi ini berlangsung berulang kali. Hal inilah yang membuat masyarakat apatis jenuh sehingga semakin hari kelompok golongan putih (golput) semakin bertambah.

Konsep kepemimpinan Asta Brata merupakan salah satu konsep yang cukup luas diapresiasi dan berasal dari naskah kuno Mahabarata. Menurut konsepsi ini maka seorang pemimpin harus meniru 8 sifat alam yang merupakan sifat inti seorang pemimpin dalam tradisi Jawa, yaitu: 1) bumi (tegas, konsisten, dan menawarkan kesejahteraan); 2) matahari (sumber pengetahuan dan sebagai sumber motivasi bagi masyarakat); 3) bulan (mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang datang dengan baik); 4) bintang (sebagai suri tauladan yang baik bagi masyarakat); 5) api (mampu menumpas seluruh pengahalang yang dapat merusak keamanan dan kententraman); 6) angin (bersifat mandiri, netral dan selalu mengawasi kinerja anak buah); 7) laut atau samudra (air) (tidak sombong dan menyerahkan segala hal kepada Tuhan Semesta Alam); 8) langit (mampu mengayomi masyarakat). Konsep kepemimpinan Asta Brata adalah salah satu referensi penting sebab di dalamnya mengandung *Leadership Power* yang memiliki kelebihan sifat yaitu kemanusiaan yang manusiawi dari seorang pemimpin.

GCG dan Gubernur DKI Jokowi

Pada masa pemilihan Gubernur DKI tahun 2012 banyak komentar pengamat politik tentang sosok Jokowi. Ada yang pesimis, bahwa Jokowi boleh sukses menjadi walikota

Solo dengan gayanya yang *low profile*, tapi berbeda dengan DKI Jakarta kota Metropolitan super heterogen, keras dan tantangannya berat sekali. Di Solo, Jokowi boleh melakukan pendekatan musyawarah, persuasif kepada masyarakat karena budaya masyarakat Solo yang kalem, bersahaja dan dapat dengan mudah ditaklukan, Masyarakat Jakarta sangat heterogen/mewakili seluruh daerah, berhadapan dengan mafia, kekerasan dan lain sebagainya. Namun, jika kita analisis secara akademis, sebetulnya gaya kepemimpinan Jokowi tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Solo.

Berikut ini adalah gaya kepemimpinan Jokowi jika dipandang dari aspek GCG.

1. *Participation*

Keterlibatan *stakeholder*, bagaimana kepemimpinan Jokowi dalam mengambil keputusan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Pembongkaran pemukiman kumuh, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lain sebagainya dilakukan langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan akan terjadi. Semua *stakeholder* dilibatkan, seperti melibatkan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

2. *Rule of law*

Ciri khas dari kepemimpinan Jokowi menjalankan hukum secara konsisten dan konsekuen, aturan berlaku untuk siapapun, penertiban PKL dan pembenahan pemukiman kumuh dapat terlaksana karena dasarnya peraturan daerah. Staf yang terlibat kasus korupsi diberi sanksi yang tegas.

Meskipun baru satu tahun jadi gubernur, namun masyarakat sudah merasakan tegaknya aturan. Hal inilah yang membuat Jokowi menjadi populer, karena masyarakat merasakan/membuktikan bahwa hukum itu ada dan berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu. Contoh kongrit tegaknya hukum seperti peng-

gusuran rumah mewah seperti yang dilansir oleh harian Republika 15 Mei 2013, "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersikap tegas pada semua warga Muara Baru yang tinggal di Bantaran Waduk Pluit. Dalam waktu dekat, Pemprov akan melakukan penggusuran pada perumahan mewah di Taman Burung, yang berada di sisi kiri waduk"

3. *Transparency*

Transparansi atau keterbukaan adalah gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jokowi, seperti membahas anggaran yang dilakukan secara terbuka dan semua orang boleh mengetahui anggaran, bahkan anggaran dibahas dengan DPRD secara terbuka diliput oleh media. Selain itu, anggaran APBD banyak beredar di media elektronik, seperti di dunia maya transparansi anggaran akan menjadi kunci utama pemerintahan Jokowi. Ia bahkan sempat melontarkan ide akan memasang APBD DKI Jakarta di setiap pos satpam/hansip atau rumah setiap Ketua RT/RW. Pembahasan anggaran secara terbuka merupakan gebrakan brilian dan luar biasa, karena selama ini anggaran merupakan sesuatu hal yang tabu untuk dipublikasikan. Hal ini adalah kondisi yang sangat kontras dengan yang terjadi selama ini hampir di seluruh biroksi, bahkan kalau kita ingin memperoleh anggaran dengan cara tertentu masyarakat malah diminta uang administrasi.

4. *Responsiveness*

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengunjungi warga yang ditinggal di rumah susun milik sendiri (rusunami) Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Jokowi tersebut untuk mediasi warga dengan Perumnas yang berencana merevitalisasi rusun tersebut menjadi lebih modern.

5. *Consensus Orientation*

Penertiban PKL, penertiban rumah kumuh memfungsikan waduk, membersihkan sungai, menertibkan sampah, menyediakan transportasi yang murah, mengatasi banjir membangun MRT, monorel semuanya merupakan hal yang berkaitan fasilitas umum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jika dicermati gebrakan Joko Widodo pada tahun pertama ini lebih fokus kepada aspek fasilitas publik.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Lelang jabatan adalah suatu gebrakan cemerlang dalam rangkahan memotong jalur dan budaya negatif di birokrasi selama ini, seperti budaya korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Lelang jabatan mulai dari jabatan lurah, camat, wali kota dan pejabat teras lain secara terbuka sangat efektif untuk mengurangi budaya KKN dan akan sangat efektif untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dan memberikan peluang pada setiap orang.

7. *Efficiency and Effectiveness*

Gubernur DKI Jakarta Jokowi sangat cocok diberi julukan gubernur yang paling fenomenal dan bahkan *nyeleneh*, namun jika dicermati tindakan atau langkah-langkah diambil sangat efektif. Kegiatan rutin tahunan Pemda DKI untuk mengadakan pasar malam atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Fair adalah kegiatan pesta rakyat, namun kegiatan pasar malam di Kemayoran sudah menyimpang dari tujuan awalnya sebagai pesta rakyat, malah berubah menjadi pesta untuk golongan *highclass*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*

Program kerja Jokowi dapat diketahui, dan dipantau. Relokasi PKL, memberes rumah kumuh dan mengembalikan fungsi fasilitas publik untuk ukuran DKI Jakarta merupakan tantangan berat, karena berhadapan dengan banyak pihak yang mempunyai kepentingan seperti premanisme, mafia tanah. Namun karena Jokowi melaksanakan proyek secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, proses pelaksanaan menjadi lebih bertanggung-jawab dan dapat dipertanggungjawabkan

9. *Strategic vision*

Visi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yaitu Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi dan manusiawi, dengan kepemimpinan dan pemerintah yang bersih dan melayani.

Misi Gubernur DKI Jakarta Jokowi yaitu (1) mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain; (3) menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta; (4) membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; dan (5) membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

KESIMPULAN

Kejenjutan masyarakat dengan gaya kepemimpinan kepala pemerintahan mulai dari level paling bawah seperti kepala lurah, camat, bupati/walikota, gubernur bahkan presiden, yang protokoler, minta dilayani, terima laporan dari bawahan dan banyak melakukan kebohongan publik serta cenderung mencari popularitas dengan cara pencitraan diri membuat masyarakat apatis, ekonomi semakin terpuruk, korupsi makin merajalela, sangat berpotensi membawa negara pada jurang kehancuran. Namun di tengah kondisi yang carut marut ini, muncul sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sangat fenomenal, dapat membuat impian masyarakat untuk menjadi kenyataan seperti impian masyarakat memiliki pemerintahan yang betul-betul pro rakyat, transparan, adil, pemerintahan yang bersih dari KKN.

Selama ini pemerintah banyak mengeluarkan peraturan, kebijakan hanya sekedar memenuhi syarat administrasi saja, tinggal di atas kertas, seperti Peraturan *Good Corporate Governance* sudah diatur dalam Peraturan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: Per-01/mbu/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Konsep GCG sangat cocok diaplikasikan di lingkungan birokrasi pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi lainnya. GCG merupakan pedoman untuk menciptakan pemerintahan yang *clean and clear*. Dalam kaitan itu, pedoman kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yaitu melaksanakan GCG dengan sungguh-sungguh. Adapun GCG terdiri dari elemen *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, Equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, A.H., 2006, Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah, *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, ISSN 1412-7377, Vol. 3, No. 1, Januari- April 2006
- Maksum, A., 2005, *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Terry, G.R., 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi aksara Rawamangun, Jakarta
- Ermizon, J., 2006, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 4, No 8 Desember 2006 p.93
- Kartono, K., 2003, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prajayanti, 2012, *Berkaca Pada Filosofi Tapa Selira Sang Juragan Kayu: Sebuah Konstruksi Sosial Kepemimpinan Jawa Joko Widodo*, Disertasi,
- Situs Internet:
- <http://www.suarapembaruan.com/home/mendagri-sudah-298-kepala-daerah-dipenjara-karena-korupsi>, 5 Juli 2013
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/17/mmxpu8-demokratizinkannya-anggotanya-kunker-ke-tiga-negara>